

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang sistem ekonominya masih tergantung dari pembiayaan sektor publik, Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 1999, Pemerintah Daerah di Indonesia memasuki fase baru dalam mengatur sistem pemerintahan. Pergantian pemerintahan dari masa orde baru ke masa orde reformasi yang dimulai pada pertengahan 1998 menuntut pelaksanaan otonomi daerah, yaitu memberikan kewenangan yang lebih luas dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Dalam pemberian kewenangan ini diwujudkan dengan pemanfaatan sumber daya nasional dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah, yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan partisipasi dalam masyarakat.

Suatu daerah dapat maju dan berkembang jika mampu menciptakan roda pemerintahan yang bersih, transparan, penerapan value for money yang benar, serta akuntabilitasnya tinggi.. Pemerintah daerah adalah lembaga yang memiliki tugas untuk mengatur rumah tangga pemerintahan di daerah, pembangunan daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Sebagai organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan, pemerintah daerah memiliki tujuan utama yang harus di penuhi, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan benar. Pelayanan tersebut antara lain : pendidikan, kesehatan

masyarakat, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, infrastruktur, dan penyediaan barang kebutuhan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan dan Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional memberikan kesempatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dengan kata lain, mengoptimalkan mutu jangkauan pelayanan dan kesejahteraan rakyat. (Nahmiati 2008).

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya (Mahmudi, 2010). Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah yaitu untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Dengan demikian, dibutuhkanlah analisis laporan keuangan untuk membantu dalam menganalisis suatu laporan keuangan, dalam perhitungan analisis laporan keuangan dapat

menggunakan metode-metode dan salah satunya yang paling umum digunakan adalah analisis rasio keuangan.

Penilaian kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang baik. Dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, baik pihak eksekutif maupun legislatif sama-sama berkepentingan untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah memberikan penjelasan yang memadai mengenai kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja, informasi kondisi keuangan, serta informasi perencanaan dan penganggaran (Novia et.al, 2015).

Tujuan pengukuran kinerja keuangan menurut Bastian (2006), yaitu sebagai laporan operasi kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk menilai kinerja keuangan organisasi dalam hal efisiensi dan efektifitas serta memonitor biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah (Hamzah, 2008).

Untuk mencapai kemandirian pemerintah daerah, pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Tujuan dari pemberian otonomi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah daerah sehingga pembangunan di daerah diarahkan agar lebih mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi pemerintah daerah apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya, yaitu potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangan secara optimal.

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang langsung ataupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan.

Kabupaten Sleman merupakan wilayah yang terletak di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai daerah yang terletak di lereng gunung Merapi, Sleman merupakan kawasan yang cukup subur. Secara administratif Sleman terdiri dari 17 kecamatan, 86 desa dan 1.212 dusun (Krisna Wahyu, 2006:32). Untuk mendapatkan kepercayaan publik, setiap kepala administratif di Kabupaten Sleman harus melaporkan kinerjanya kepada kepala administratif yang lebih tinggi atau yang berada di atasnya dan kepada masyarakat umum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meneliti tentang kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Sleman untuk dapat menilai sejauh mana kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Sleman dalam lima tahun terakhir. Oleh karena itu penulis mengambil judul “Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Pada Tahun 2015-2019”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sleman jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD ?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sleman jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah ?
3. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sleman jika dilihat dari Rasio Keserasian?
4. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sleman jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan ?
5. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sleman jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ?

C. Batasan Masalah

Peneliti memfokuskan penelitian ini dibatasi pada “Analisis Kinerja Keuangan Daerah yang dilihat dari aspek Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan

dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di kabupaten Sleman pada tahun 2015 sampai dengan 2019”.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sleman jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD.
2. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sleman jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.
3. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sleman jika dilihat dari Rasio Keserasian.
4. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sleman jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan.
5. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sleman jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka menentukan kebijakan untuk meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bagi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, sebagai bahan untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang ingin memperdalam pengetahuan tentang keuangan daerah.

3. Bagi penulis, sebagai sarana untuk memperdalam dan menerapkan teori.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian dari pendahuluan yang berisi dari beberapa sub bab, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan bagian dari teori-teori dari hasil studi pustaka yang dijadikan dasar untuk menganalisis data yang diperoleh.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari analisis data dan pembahasan sesuai dengan metode penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan, dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.



UNIVERSITAS
MERCU BUANA
YOGYAKARTA